



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

---

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke	: 8
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Kepala Badan Pelaksana BPKH dan Dirjen PHU / Plt. Sekjen Kemenag RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Rabu, 15 April 2020.
Waktu	: Pukul 14.00 WIB.
Tempat	: Virtual / Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: 1. Tindak Lanjut Rencana Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M 2. Isu – Isu Aktual dan Solusinya
Ketua Rapat	: H.YANDRI SUSANTO, SPt.
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 45 dari 52 Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. 7 Orang Anggota Komisi VIII DPR RI Izin. 3. Kepala BPKH Beserta Jajaran. 4. Dirjen PHU / Plt. Sekjen Kemenag RI Beserta Jajaran

**I. PENDAHULUAN:**

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 14.05 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H.Yandri Susanto, S.Pt dengan didampingi Wakil Ketua H.M.R. Ihsan Yunus, ME.Con.,Std, Wakil Ketua DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si Wakil Ketua Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik, MPA. dan Wakil Ketua H. Marwan Dasopang, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI secara virtual bersama Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama RI dan Kepala Badan Pelaksana BPKH membahas **“Tindak Lanjut Rencana Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M dan Isu-isu Aktual,”** disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI mengenai progres persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M yang telah dilakukan, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi.

Selanjutnya, Komisi VIII DPR RI meminta Direktur Jenderal PHU Kementerian Agama RI agar persiapan penyelenggaraan ibadah haji mengikuti protokol penanganan Covid-19 sesuai yang ditetapkan Pemerintah.

2. Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI untuk melakukan realokasi anggaran pelaksanaan manasik haji metode tatap muka untuk pelaksanaan metode pembelajaran jarak jauh dan media elektronik sebagai upaya pencegahan penyebaran wabah Covid-19.
3. Komisi VIII DPR RI mendesak Pemerintah RI untuk segera menentukan batas waktu kepastian Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1441 H/2020 M dengan memperhatikan kondisi objektif penanganan wabah Covid-19 di dalam negeri dalam waktu secepatnya.
4. Apabila Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M tidak diselenggarakan dikarenakan kondisi darurat, Komisi VIII DPR RI berpendapat:
  - a. Setoran lunas Calon Jemaah Haji Reguler dapat dikembalikan kepada jemaah yang telah melunasi Bipih. Terhadap Jemaah yang menarik kembali setoran lunasnya, yang bersangkutan akan menjadi jemaah berhak lunas pada tahun berikutnya.
  - b. Setoran lunas Calon Jemaah Haji Khusus dapat dikembalikan kepada jemaah melalui PIHK. PIHK yang akan menarik kembali setoran lunas Jemaah wajib mencantumkan nomor rekening jemaah yang melakukan penarikan setoran lunas. BPKH akan melakukan transfer Bipih khusus lunas langsung ke Rekening Jemaah. Secara otomatis jemaah yang bersangkutan menjadi jemaah berhak lunas pada tahun berikutnya.

- c. Anggaran Penyelenggaraan Ibadah Haji yang bersumber dari APBN Ditjen PHU dapat direalokasikan dalam mendukung percepatan penanganan dampak wabah Covid-19 setelah adanya kepastian keputusan pembatalan Penyelenggaraan Ibadah Haji.
5. Komisi VIII DPR RI mendesak Kepala Badan Pelaksana BPKH untuk:
    - a. Fokus mengelola Keuangan Haji yang saat ini memiliki risiko sangat tinggi dikarenakan situasi perekonomian nasional dan global yang tidak stabil.
    - b. Melakukan kajian penempatan dan investasi Keuangan Haji dalam perekonomian yang tidak tumbuh sebagai dampak wabah Covid-19.
    - c. Meningkatkan sosialisasi penggunaan dana kemaslahatan yang digunakan untuk mendukung penanganan dampak wabah Covid-19 kepada masyarakat agar tidak menimbulkan salah persepsi.
    - d. Menyampaikan data rinci mengenai sebaran lokasi pemberian bantuan dalam mendukung penanganan dampak wabah Covid-19 yang telah dilakukan sebagai bahan pengawasan sesuai dengan jumlah besaran Jemaah haji.
    - e. Melakukan efisiensi anggaran dari kegiatan yang tidak prioritas seperti anggaran perjalanan dinas, rapat-rapat, dan sejenisnya.
    - f. Melakukan realokasi anggaran kemaslahatan untuk membantu percepatan penanganan dampak wabah Covid-19.
  6. Komisi VIII DPR RI akan melakukan Rapat Dengar Pendapat secara khusus dengan BPKH untuk membahas arah kebijakan pengelolaan keuangan haji sesuai tupoksi BPKH.
  7. Dalam rangka tindak lanjut persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M, Komisi VIII DPR RI meminta Dirjen PHU Kementerian Agama RI dan Kepala Badan Pelaksana BPKH untuk menindaklanjuti masukan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
    - a. Segera melakukan kajian aspek payung hukum dan mekanisme pengambilan keputusan yang harus dilakukan jika penyelenggaraan ibadah haji tidak diselenggarakan dan menyampaikannya kepada Komisi VIII DPR RI, di antaranya perlunya dikeluarkan Perppu atau payung hukum lainnya.
    - b. Menjaga efektivitas penyampaian pesan dan muatan manasik haji yang dilakukan melalui metode pembelajaran jarak jauh dan media elektronik.

- c. Melakukan sosialisasi secara massif kepada para calon Jemaah haji jika penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 H/2020 M tidak diselenggarakan.
- d. Mempercepat distribusi buku manasik haji bagi calon Jemaah haji.
- e. Mengutamakan perlindungan terhadap calon Jemaah haji dalam memutuskan kebijakan mengenai diselenggarakan atau tidaknya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M dengan melakukan konsultasi, di antaranya dengan MUI.

### **III. P E N U T U P**

Rapat ditutup pukul 18.10 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI  
KETUA,**

**H.YANDRI SUSANTO, SPt.**